



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jln. H. Agus Salim

Telp. (0756) 21005 PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900/ 01 /BPKD-PS/2021

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa agar tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /38/ Kpts / BPT-PS / 2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangannya;
 2. Mematuhi dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku;
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
 4. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul dilapangan;
 6. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan dengan tembusan :
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bagian Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan.
 - c. Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/26/BPKD-PS/2020 tanggal 01 September 2020 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/01/BPKD-PS/2020 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Pengelola Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 12 Januari 2021

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA



SUHANDRI, SE., MM

NIP.19700608 200212 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bank Nagari cabang di Painan
4. Kabid dilingkungan BPKD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Peringgal.

: NOMOR : 900/ 01 /BPKD-PS/2021

: TANGGAL : 12 Januari 2021

: TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1		3	4	5	6	7
I	Sekretariat					
1.	SUBCHAN KHALID, SE NIP. 19800429 200501 1 007	Penata Muda / III a	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	PPTK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					3. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.	DESTI FAJRIANI, SE NIP. 19851207 201001 2 029	Penata Muda / III a	Analisis Perencanaan	PPTK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					2. Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
II	BIDANG ANGGARAN					
1.	BRONNITA, S.Pd, MM NIP. 19750820 200701 2 007	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbid Evaluasi Anggaran	PPTK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1		3	4	5	6	7
2.	WILLY SUSPARELA, SE NIP. 19790404 200312 2 005	Penata (III/c)	Kasubbid Perenc. & Kebijakan Anggaran	PPTK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA da PPAS 3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
3.	RAHAYU KURNIA PUTRI, SE NIP. 19871116 200604 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbid Penyusunan Anggaran	PPTK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
4.	HALIFAH MARYENTI, SE NIP. 19800913 201407 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	PPTK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
III	BIDANG PERBENDAHARAAN					
1.	YANTI YOSEFA, SE NIP. 19800801 200701 2 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbid Perbendaharaan & Verifikasi	PPTK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.	LUSIANA, S.Kom, MM NIP. 19810406 200902 2 005	Penata (III/c)	Kasubbid Informasi Keuangan Daerah	PPTK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
3.	FITRI HANDAYANI, AMd NIP. 19810803 200501 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbid Pengelolaan Kas Umum Daerah	PPTK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2. Koordinasi , Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	
IV	BIDANG BMD & AKUNTANSI					
1.	ROSZA LESTARI, SE NIP. 19780920 200701 2 007	Penata (III/c)	Kasubbid Perenc. & Pengendalian BMD	PPTK	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Penyusunan Standar Harga 2. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1		3	4	5	6	7
2.	RAHMADI, SAP, M.Si NIP. 19850723 200501 1 002	Penata (III/c)	Kasubbid Akuntansi	PPTK	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
3.	RENI DAHLIA, SE NIP. 19730130 200701 2 004	Penata (III/c)	Kasubbid Penatausahaan & Pelaporan BMD	PPTK	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Penatausahaan Barang Milik Daerah 3. Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 4. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 5. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
4.	MUHAMMAD ZAKI. E.M.M, SE NIP. 19821030 201502 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Staf BPKD	PPTK	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Inventarisasi Barang Milik Daerah	
5.	ASWENRIZAL, S.Sos NIP. 19760116 200801 1 007	Penata Muda (III/a)	Staf BPKD	PPTK	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 2. Pengamanan Barang Milik Daerah	

Painan, 12 Januari 2021





SUHANDRI, SE., MM
NIP.19700608 200212 1 003